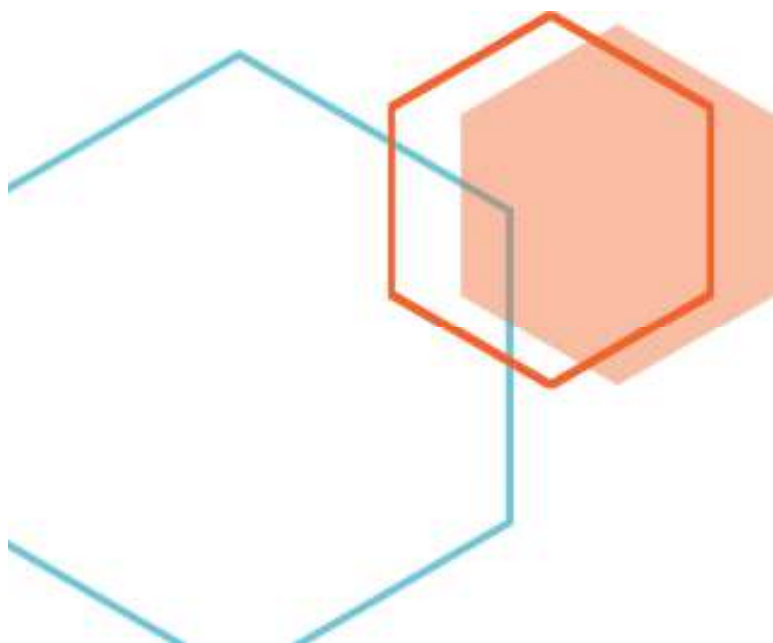


# RENCANA AKSI KEGIATAN 2015 -2019

---

**KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II  
TANJUNGPINANG**

DIREKTORAT JENDRAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tim penyusun dapat menyelesaikan “Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Tahun 2015-2019” ini tepat waktu dengan bantuan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak.

Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dibuat sebagai upaya menetapkan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan berkesinambungan dalam tugas pokok dan fungsi KKP sesuai dengan Permenkes RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Atas Permenkes No. 356/Menkes/Per/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP serta Amanat IHR Tahun 2005.

Dalam rangka penyempurnaan, tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap sustansi dari RAK KKP Kelas II Tanjungpinang tahun 2015-2019 ini sesuai dengan perkembangan, perubahan dan dinamika pembangunan kesehatan.

Semoga RAK ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan dalam perencanaan program 5 tahunan yakni 2015 – 2019. Dalam menyelesaikan proses penyusunan RAK ini, Tim Penyusun banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu Tim Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah mendukung penyusunan RAK ini.

Tanjungpinang, Januari 2017  
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II  
Tanjungpinang



**Sulistyono, SKM, M.Kes**  
NIP. 197011201993031002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Lampiran .....	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Gambaran Umum .....	3
1.3 Potensi .....	16
<b>BAB II    VISI, MISI, NILAI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1 Visi .....	19
2.2 Misi .....	19
2.3 Nilai .....	20
2.2 Tujuan .....	21
2.3 Sasaran Strategis .....	22
<b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1 Arah Kebijakan .....	24
3.2 Strategi .....	28
<b>BAB IV    PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KKP KELAS II TANJUNGPINANG</b>	
4.1 Program Pokok .....	29
4.2 Jejaring Kerja .....	32
<b>BAB V    PENYELENGGARAAN KEGIATAN</b>	
5.1 Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan dan Kesehatan Matra .....	34
5.2 Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang .....	36
5.3 Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat PML .....	39
5.4 Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat PTM, Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan PTM .....	41
5.5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya .....	42
<b>BAB VI    PEMANTAUAN DAN PENILAIAN .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB VII    PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Distribusi Pegawai KKP Kelas II Tanjungpinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	16
Tabel 2.	Sarana dan Prasarana KKP Kelas II Tanjungpinang .....	17

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi KKP Kelas II Tanjungpinang .....	4
Gambar 2.	Peta Wilker KKP Kelas II Tanjungpinang .....	6
Gambar 3.	Peta Wilker Tanjung Uban .....	9
Gambar 4.	Peta Wilker Kijang .....	10
Gambar 5.	Peta Wilker Lobam .....	12
Gambar 6.	Peta Wilker Tarempa .....	14

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks RAK KKP Kelas II Tanjungpinang

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tercapainya hasil yang diharapkan tidak terlepas dari kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam

pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam hal ini KKP Kelas II Tanjungpinang sebagai UPT Kementerian Kesehatan di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sesuai dengan Tupoksi yang di amanahkan bertanggungjawab dalam upaya pengendalian masuk / keluarnya penyakit karantina dan penyakit potensial wabah melalui pelabuhan / bandara. Dan berdasarkan dari sasaran pokok RPJMN 2015-2019 fokus KKP adalah pada poin 2 dan poin 3 yaitu, meningkatnya pengendalian penyakit dan meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Secara detail KKP Kelas II Tanjungpinang dalam Rencana Aksi Kegiatan menitik beratkan pada masalah pokok yaitu :

1. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, dengan sasaran kinerjanya adalah menurunnya penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
2. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, dengan sasaran kinerjanya adalah menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra
3. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, dengan sasaran kinerjanya adalah meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang
4. Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dengan sasaran kinerjanya adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung



5. Pengendalian Penyakit Tidak Menular, dengan sasaran kinerjanya adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian serta meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
6. Penyehatan Lingkungan, dengan sasaran kinerjanya adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
7. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan sasaran kinerjanya adalah meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

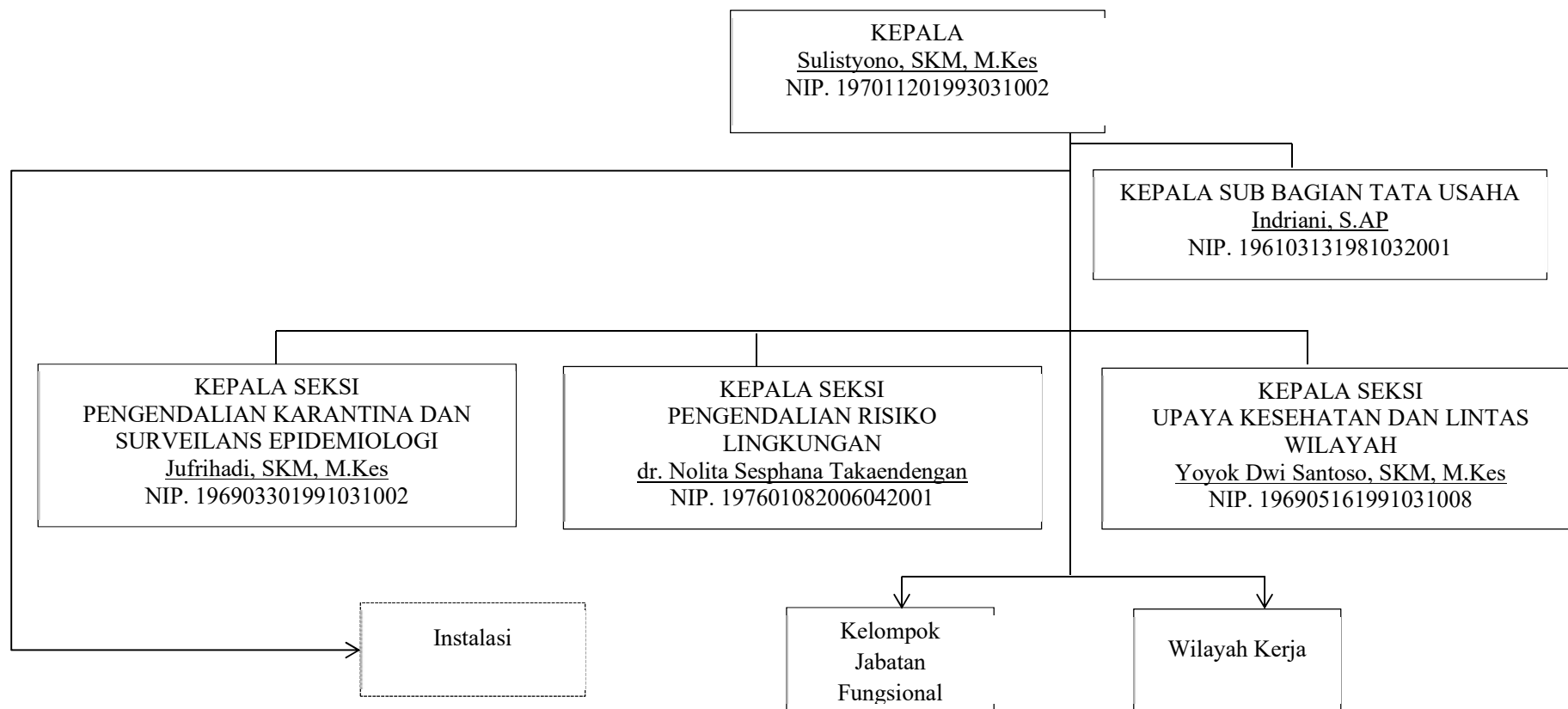
Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015-2019 KKP Kelas II Tanjungpinang diharapkan dapat mensukseskan upaya kesehatan yang berkesinambungan dalam hal pelaksanaan upaya pengendalian seluruh kondisi potensial untuk cegah tangkal penyakit di pelabuhan/bandara Tanjungpinang. Penyusunan RAK ini juga menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan/anggaran KKP Kelas II Tanjungpinang agar terarah dan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan.

## **1.2. Gambaran Umum**

Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan (KKP), merupakan Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Berikut dilampirkan struktur Organisasi KKP Kelas II Tanjungpinang :

**GAMBAR1. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2348/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 Pasal 2, KKP menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kekarantinaan;
2. Pelaksanaan pelayanan kesehatan;
3. Pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali;
5. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi, dan kimia;
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional;
7. Pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk;
8. Pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
9. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan obat, makanan, kosmetika dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impor;
10. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya;
11. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
12. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
13. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara;
14. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan surveilans kesehatan pelabuhan;
15. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batasdarat negara;

## 16. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangaan KKP

Secara umum wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang berada di jalur pelayaran Internasional yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapore. Berikut dilampirkan peta wilayah kerja KKP Kelas II Tanjungpinang :



Gambar 2. Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang terdiri atas 1 Kantor Induk dan 10 Wilayah Kerja yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Kantor induk KKP Kelas II Tanjungpinang awalnya terletak di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjungpinang. Namun, dengan selesainya pembangunan rehat berat gedung kantor baru pada akhir tahun anggaran 2016, maka terhitung sejak awal tahun 2017, aktivitas administrasi perkantoran, pelayanan kesehatan dan

vaksinasi internasional dipindahkan ke gedung baru yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 6 Tanjungpinang. Sedangkan pelayanan penerbitan dokumen kesehatan kapal, pengawasan alat angkut, dan pengendalian risiko lingkungan tetap dilaksanakan di Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang sendiri terdiri dari dua dermaga yakni Dermaga Domestik dan Dermaga Internasional. Pelabuhan Sri Bintan Pura menghubungkan kota Tanjung Pinang dengan pelabuhan-pelabuhan di sebelah utara (pelabuhan Lobam dan pelabuhan Bulang Linggi), dengan kepulauan di sebelah barat, seperti pelabuhan Tanjung Balai (pulau Karimun), pelabuhan Telaga Punggur di pulau Batam, serta kepulauan di sebelah selatan seperti pulau Lingga dan Singkep. Untuk pelayaran ke luar negeri, pelabuhan Sri Bintan Pura juga mempunyai jalur perhubungan ke Singapura (*Harbour Front* dan Tanah Merah) serta Malaysia (Situlang Laut).

Daerah *buffer* kantor induk KKP Kelas II Tanjungpinang terdiri dari :

- a. Pelabuhan Sri Payung Batu VI  
Pelabuhan Sri Payung merupakan pelabuhan bongkar muat.
- b. Pelabuhan ASDP Dompok  
Pelabuhan ASDP Dompok merupakan pelabuhan kapal Roro dengan tujuan penyeberangan ke Tanjung Balai Karimun dan Dabo Singkep.

Wilayah Kerja yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau meliputi :

1. Wilayah Kerja Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah (Kota Tanjungpinang)

Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) merupakan salah satu wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang yang terletak sekitar 11 km dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Bandara RHF saat ini melayani maskapai *Garuda Indonesia Airways*, *Nam Air* dan *Lion Air* dengan rute penerbangan Tanjungpinang-Jakarta-Tanjungpinang. Pada awal tahun 2017, Bandara RHF juga melayani rute internasional Tanjungpinang-China dari

maskapai Citilink. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Bandara RHF meliputi :

- a. Pelayanan poliklinik
- b. Pelayanan vaksinasi internasional
- c. Penerbitan surat keterangan laik terbang
- d. Penerbitan surat izin angkut jenazah
- e. Pengawasan TTU/TPM
- f. Pengamatan sanitasi lingkungan
- g. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- h. Pengawasan alat angkut dan penumpang

2. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tanjung Uban ( Kabupaten Bintan )

Wilayah kerja Pelabuhan Laut Tanjung Uban terletak di Bintan Utara, Kabupaten Bintan dengan jarak tempuh sekitar 90 km (waktu tempuh  $\pm 2$  jam) dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Kantor wilker Tanjung Uban sementara masih difasilitasi oleh PT. Pertamina Tanjung Uban. Wilker Tanjung Uban merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuknya penumpang dari Batam menuju Pulau Bintan menggunakan *speedboat* dan angkutan kapal ASDP. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Tanjung Uban meliputi :

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan pelaksanaan hapus serangga dan vektor
- e. Pengawasan TTU/TPM
- f. Pengamatan sanitasi lingkungan
- g. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- h. Pengawasan alat angkut dan penumpang

Berikut peta wilayah kerja pelabuhan Tanjung Uban



Gambar 3. Peta Wilayah Kerja Tanjung Uban

### 3. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Samudera Kijang ( Kabupaten Bintan )

Wilayah kerja Pelabuhan Laut Samudera Kijang terletak di Bintan Timur, Kabupaten Bintan dengan jarak tempuh sekitar 30 km (waktu tempuh  $\pm 1$  jam) dari Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Kantor Wilayah Kerja Kijang sementara masih difasilitasi oleh PT. Pelindo II Kawasan Sei Kolak Kijang. Selama dua tahun terakhir, gedung wilker kijang masih berstatus sewa. Wilker Kijang merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuknya penumpang dari Jakarta hingga wilayah timur Indonesia karena terdapat PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilayah kerja Kijang meliputi:

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC

- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan pelaksanaan hapus serangga dan vektor
- e. Pengawasan TTU/TPM
- f. Pengamatan sanitasi lingkungan
- g. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- h. Pelayanan vaksinasi internasional
- i. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- j. Pendampingan pelayanan kesehatan haji
- k. Pelayanan kesehatan pada penyelam tradisional
- l. Pelayanan Posbindu PTM

Berikut Peta wilayah kerja pelabuhan Kijang



Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Pelabuhan Kijang

#### 4. Wilayah Kerja Pelabuhan Lagoi (Kabupaten Bintan)



Wilayah kerja Lagoi terletak di Bintan Utara, Kabupaten Bintan dengan jarak tempuh sekitar 60 km (waktu tempuh  $\pm 1.5$  jam) dari kantor induk KKP Kelas II Tanjungpinang. Lagoi merupakan kawasan wisata terpadu yang terdapat di Pulau Bintan dan merupakan PoE Indonesia dan telah di assessment oleh WHO dan Kemenkes. Kawasan wisata Lagoi dikelola oleh dua perusahaan yakni Bandar Bentan Telani (BBT) Lagoi dan Bintan Lagoon. Pada Hari Kesehatan Nasional Tahun 2016, Pelabuhan Bandar Bentan telani Lagoi mendapatkan penghargaan peringkat Pelabuhan Khusus Tingkat Nasional. Wisatawan yang berkunjung ke Lagoi mayoritas berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara seperti Korea, Jepang, Singapura dan Malaysia. Kawasan wisata Lagoi melayani rute pelayaran Lagoi-Singapura ( $\pm 40$  menit menggunakan *ferry*) dan Lagoi-Malaysia ( $\pm 60$  menit menggunakan *ferry*). Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Lagoi meliputi :

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan TTU/TPM
- e. Pengamatan sanitasi lingkungan
- f. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- g. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- h. Pelayanan poliklinik terbatas
- i. Penyelenggaraan pelabuhan sehat

5. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sri Udana Lobam ( Kabupaten Bintan )

Wilayah kerja Lobam terletak di Bintan Utara, Kabupaten Bintan dengan jarak tempuh sekitar 70 km (waktu tempuh  $\pm 1.5$  jam) dari kantor induk KKP Kelas II Tanjungpinang. Wilayah Kerja Pelabuhan Lobam merupakan kawasan industri khusus yang dikelola oleh PT. Bintan Inti Industrial Estate (PT. BIIE) berada di Pulau Bintan dan merupakan pelabuhan internasional

yang melayani rute Lobam-Singapore ( $\pm 60$  menit menggunakan *ferry*).

Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Lobam meliputi :

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan TTU/TPM
- e. Pengamatan sanitasi lingkungan
- f. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- g. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- h. Pelayanan poliklinik terbatas

Berikut Peta wilayah kerja pelabuhan Lobam :



Gambar 5. Peta Wilayah Kerja Pelabuhan Lobam

6. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tambelan ( Kabupaten Bintan )

Wilayah kerja Tambelan merupakan wilayah kerja binaan KKP Kelas II Tanjungpinang. Pulau Tambelan terletak di Laut Cina Selatan dengan jarak tempuh dari pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang ke Pulau Tambelan sekitar 185 mil laut ( $\pm 15$  jam menggunakan kapal *ferry*). Wilayah kerja Tambelan belum dilaksanakan kegiatan pelayanan Kantor Kesehatan Pelabuhan dikarenakan letak geografis yang cukup jauh dan akses transportasi yang sangat terbatas.

7. Wilayah Kerja Pelabuhan Udara Matak ( Kabupaten Anambas )

Wilayah kerja Pelabuhan Udara Matak terletak di Kabupaten Anambas dengan waktu tempuh  $\pm 8$  jam dari Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang menggunakan kapal *ferry* kemudian disambung dengan perjalanan menggunakan *speedboat*  $\pm 1$  jam. Pelabuhan Udara Matak dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan minyak PT. Medco. Rute penerbangan yang terdapat di bandara ini adalah Jakarta-Matak oleh maskapai Trigana Air dan Tanjungpinang-Matak oleh maskapai Susi Air. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Matak adalah pengawasan alat angkut (pesawat).

8. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tarempa ( Kabupaten Anambas )

Wilayah kerja Pelabuhan Laut Tarempa terletak di Kabupaten Anambas dengan waktu tempuh  $\pm 10$  jam dari Pelabuhan Sri Bintang Pura Tanjungpinang menggunakan kapal *ferry*. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Tarempa meliputi :

- a. Penerbitan PHQC
- b. Penerbitan COP
- c. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- d. Pengendalian vektor malaria, DBD dan diare
- e. Pengamatan sanitasi lingkungan, TTU dan TPM

Berikut Peta Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Tarempa :



Gambar 6. Peta Wilayah Kerja Pelabuhan Tarempa

#### 9. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Dabo Singkep ( Kabupaten Lingga )

Wilayah kerja Dabo Singkep terletak di Kabupaten Lingga dengan jarak waktu tempuh  $\pm 4$  jam dari kantor induk KKP Kelas II Tanjungpinang. Pelabuhan Dabo Singkep merupakan pelabuhan rakyat untuk mengangkut komoditi pertanian dan perikanan ke pulau sekitar. Sarana gedung wilayah kerja Dabo saat ini masih berstatus sewa. Pelabuhan yang terdapat di pulau Dabo Singkep adalah Pelabuhan Dabo, Pelabuhan Kote, Pelabuhan Jagoh, Sungai Buluh, Bakong, dan Maroktua. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Dabo Singkep meliputi :

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC

- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan TTU/TPM
- e. Pengamatan sanitasi lingkungan
- f. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- g. Pengawasan alat angkut dan penumpang
- h. Pelayanan poliklinik terbatas
- i. Pelayanan vaksinasi internasional

10. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Ranai ( Kabupaten Natuna )

Wilayah kerja Ranai berada di Pulau Natuna Besar, Kabupaten Natuna dan merupakan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ranai terletak di lokasi strategis Laut Cina Selatan, yang langsung berbatasan dengan berbagai negara meliputi Vietnam, Kamboja dan Malaysia. Sarana gedung wilayah kerja Dabo saat ini masih berstatus sewa. Infrastruktur pelabuhan/ bandara yang terdapat Ranai meliputi Pelabuhan Selat Lampa, Pelabuhan Penagih dan Bandar Udara Ranai. Wilker Ranai dapat ditempuh melalui udara dan laut. Perjalanan udara ditempuh selama  $\pm 1.5$  jam dari Batam, sedangkan perjalanan laut ditempuh selama  $\pm 2$  hari menggunakan Kapal Pelni. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di Wilker Ranai meliputi :

- a. Penerbitan SSCEC/SSCC
- b. Penerbitan PHQC
- c. Penerbitan COP
- d. Pengawasan TTU/TPM
- e. Pengamatan sanitasi lingkungan
- f. Pengamatan dan pemberantasan vektor DBD dan malaria
- g. Pelayanan vaksinasi internasional
- h. Pengawasan alat angkut dan penumpang

### 1.3. Potensi

#### 1) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen lain seperti modal, teknologi dan uang. Dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang berkualitas yang mempunyai kemampuan manajerial dan teknis yang sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan organisasi.

Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang terdiri dari dokter umum, perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan tenaga teknis umum lainnya yang terbagi dalam beberapa jabatan fungsional diantaranya fungsional dokter, fungsional epidemiolog, fungsional sanitarian, fungsional entomologi, fungsional perawat dan fungsional umum.

Dalam melaksanakan analisis kebutuhan SDM diperlukan pertimbangan dasar pendidikan yang dibutuhkan, seiring dengan dukungan dalam seleksi penerimaan SDM yang selektif sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah diusulkan KKP Kelas II Tanjungpinang. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung dalam pemenuhan SDM berkualitas. Pengembangan selanjutnya diperlukan program peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM baik berupa pendidikan lanjut formal, diklat-diklat teknis program, dan lain-lain yang sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan KKP.

Tabel berikut merupakan gambaran SDM yang dimiliki oleh KKP Kelas II Tanjungpinang berdasarkan tingkat pendidikannya :

Tabel 1. Distribusi Pegawai KKP Kelas II Tanjungpinang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2 Kesehatan Masyarakat	2

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
2.	S2 Epidemiologi	2
3.	S2 Akuntansi	1
4.	Dokter Umum	5
5.	Ners	1
6.	S1 Ekonomi Akuntansi	3
7.	S1 Keperawatan	6
8.	S1 Kesehatan Masyarakat	12
9.	S1 Kesmas Epidemiologi	4
10.	S1 Sospol Administrasi Negara	1
11.	S1 Sospol Ilmu Pemerintahan	2
12.	D.III Keperawatan	4
13.	D.III Kesehatan Lingkungan	7
14.	SPK	2
15.	SMP	1
	<b>Jumlah</b>	<b>53</b>

## 2) Sarana / Prasarana

Sarana yang telah dimiliki oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah berupa gedung kantor yang representatif dan kendaraan operasional roda dua maupun roda empat serta sarana dan prasarana lainnya yang menunjang seperti ambulance.

Tabel berikut merupakan gambaran SDM inventaris yang dimiliki oleh KKP Kelas II Tanjungpinang terdiri dari barang bergerak dan tidak bergerak :

Tabel 2. Sarana dan Prasarana KKP Kelas II Tanjungpinang

NO	KATAGORI BARANG	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bergerak	Minibus	6 Unit	Kondisi baik
		Pick Up	2 Unit	Kondisi baik
		Kendaraan derek	1 Unit	Kondisi baik
		Ambulance	3 Unit	Kondisi baik
		Kendaraan situasi khusus	1 Unit	Kondisi baik
		Kendaraan roda 2	12 Unit	Kondisi baik
2.	Barang Tidak Bergerak	Gedung Kantor KKP induk	1 Unit	Kondisi baik dan tersertifikasi

<b>NO</b>	<b>KATAGORI BARANG</b>	<b>JENIS BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
		Gedung Kantor Wilker Lobam	1 Unit	Kondisi baik dan tersertifikasi
		Gedung Kantor Wilker Tarempa	1 Unit	Kondisi kurang baik dan dalam tahap sertifikasi
		Gedung Kantor A. Yani	1 Unit	Selesai pembangunan rehab berat
		Rumah Jabatan Kepala Kantor	1 Unit	Kondisi baik dan tersertifikasi
		Tanah untuk pembangunan gedung kantor Wilker Tg. Uban	1 Lahan	Dalam tahap sertifikasi
		Tanah untuk pembangunan gedung kantor Wilker Kijang	1 Lahan	Tersertifikasi



## **BAB II**

### **VISI, MISI, NILAI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 Visi**

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang yang merupakan instansi pemerintah terdepan dalam penegakkan upaya cegah tangkal penyakit di setiap pintu masuk kawasan khususnya Propinsi Kepulauan Riau menyusun rencana strategis untuk merealisasikan hal tersebut di atas dengan mensinergikan visi dan misi dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia

Visi rencana strategis yang ingin dicapai adalah “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”. Untuk mewujudkan dari visi pemerintah tersebut KKP Kelas II Tanjungpinang menetapkan visi “Tangguh dalam Cegah Tangkal dan Prima dalam Pelayanan”.

Gambaran prima dalam cegah tangkal penyakit dan pelayanan kesehatan di atas adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang selalu siaga dan cepat tanggap terhadap risiko KLB dan keluar/masuknya penyakit melalui pelabuhan/bandara serta selalu mengedepankan berbagai upaya kesehatan yang efektif dan efisien yang dianggap prioritas dan mempunyai daya ungkit besar di dalam pencapaian hasil pembangunan kesehatan, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus dan fokus kegiatan, kesehatan, pembangunan kesehatan khususnya di lingkungan pelabuhan dan bandara yang menjadi target utama Kantor Kesehatan Pelabuhan.

#### **2.2 Misi**

Untuk mewujudkan visi pemerintah adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mengimplementasikan misi pemerintah tersebut, KKP Kelas II Tanjungpinang dengan menyelaraskan sasaran program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengendalian penyakit bersumber binatang, penyakit menular langsung serta penyakit tidak menular.
- b. Melakukan pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra, dengan sasaran kinerjanya adalah menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveilans, karantina kesehatan, dan kesehatan matra
- c. Melakukan kegiatan penyehatan lingkungan, dengan sasaran kinerjanya adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
- d. Melaksanakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

### **2.3. Nilai**

Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut :

#### **1. Pro Rakyat**

Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-

tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

2. Inklusif

Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

3. Responsif

Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

4. Efektif

Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

5. Bersih

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel.

## 2.4. Tujuan

a. Tujuan Umum

Terselenggaranya pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk Negara.

b. Tujuan Khusus

1. Terselenggaranya pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi
2. Terselenggaranya pengendalian risiko lingkungan
3. Terselenggaranya upaya kesehatan dan lintas wilayah

4. Terselenggaranya dukungan manajemen dan ketatausahaan

## 2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kantor kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang tahun 2015-2019 meliputi :

1. Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan
2. Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit Menular
3. Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus
4. Jumlah Pelabuhan/Bandara yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi
5. Jumlah Sertifikat Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang diterbitkan
6. Jumlah Pelabuhan/Bandara Wilayah Perimeter dan Buffer Area Bebas Vektor
7. Jumlah orang yang Melakukan Skrining Penyakit Tidak Menular
8. Jumlah orang yang melakukan Skrining dan/atau Sosialisasi Penyakit Menular Langsung
9. Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dilaporkan ke Ditjen P2P
10. Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan Kantor Kesehatan Kelas II Tanjungpinang dalam melaksanakan tupoksi sesuai dengan visi misinya adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan, dan Kesehatan Matra.

Menurut IHR tahun 2005 Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan *Port Health Authority* yang artinya bahwa segala urusan mengenai kesehatan di pelabuhan dan bandara menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan. Sejalan dengan IHR tersebut salah satu fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah menyelenggarakan pengawasan kekarantinaan dan surveilans epidemiologi. Indikator dalam pelaksanaan program ini adalah layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB, layanan kekarantinaan kesehatan, dan layanan pengendalian penyakit infeksi emerging.

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi alat angkut membuat jarak antar seolah semakin dekat karena waktu tempuh yang semakin singkat sehingga mobilitas orang dan barang semakin cepat melebihi masa inkubasi penyakit menular. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap risiko penularan penyakit secara global.

Ancaman global yang kita hadapi yaitu timbulnya kembali penyakit menular yang sudah pernah terjadi (*re-emerging disease*), penyakit yang masih merupakan masalah (*emerging disease*), penyakit baru yang muncul (*new emerging disease*) dan kemungkinan bio terorisme. Untuk mengantisipasi masuk dan keluarnya ancaman global tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang maka perlu adanya peningkatan kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD).

## 2. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang.

Guna mengantisipasi ancaman penyakit global dan permasalahan kesehatan masyarakat yang merupakan masalah darurat yang menjadi perhatian dunia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dituntut mampu menangkal risiko kesehatan yang mungkin masuk melalui alat angkut, orang dan barang termasuk kontainer dari negara lain dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan.

Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan merupakan salah satu upaya mencegah penyebaran penyakit PHEIC melalui pemutusan mata rantai penularan penyakit bersumber lingkungan. Upaya pengendalian risiko lingkungan bertujuan agar wilayah pelabuhan dan alat angkut tidak menjadi sumber penularan ataupun tempat perindukan bagi kuman/vektor penyakit.

Adapun indikator pelayanan dalam upaya meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang meliputi :

- a. Layanan pengendalian penyakit malaria berupa survei jentik vektor malaria, survei nyamuk vektor malaria, pengendalian vektor malaria dan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian malaria di wilayah pelabuhan/bandara dan alat angkut.
- b. Layanan pengendalian penyakit arbovirosis (DBD dan *yellow fever*) berupa survei jentik nyamuk *Aedes sp.*, dan pengendalian DBD dan *yellow fever* di wilayah pelabuhan/bandara dan alat angkut.
- c. Layanan pengendalian penyakit zoonosis (Pes) berupa survei dan pengendalian tikus dan pinjal di wilayah pelabuhan/bandara dan alat angkut.
- d. Layanan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit berupa survei dan pengendalian lalat dan kecoa di wilayah pelabuhan/bandara dan alat angkut.

3. Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung.

Dalam medis, penyakit menular atau penyakit infeksi adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi (seperti virus, bakteri, atau parasit) bukan disebabkan faktor fisik (seperti luka bakar) atau kimia (seperti keracunan). Cara-cara penularan penyakit :

- a. Media langsung dari orang ke orang (permukaan kulit) diantaranya HIV/AIDS, IMS, Kusta.
- b. Media udara penyakit yang dapat ditularkan secara langsung ataupun tidak langsung melalui udara pernafasan disebut juga air borne diseases (TB paru, ISP dan ISPA)

Dalam program penanggulangan penyakit menular langsung, KKP menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan kesehatan terbatas di wilayah pelabuhan dan bandara dengan indikator pelayanan meliputi :

1. Layanan Pencegahan HIV/AIDS
2. Layanan Pencegahan penyakit IMS
3. Layanan Pencegahan penyakit TB
4. Layanan Pencegahan penyakit Kusta
5. Layanan Pencegahan penyakit ISP
6. Layanan Pencegahan penyakit ISPA

4. Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak ditularkan kepada orang lain, termasuk cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

Penyakit tidak menular (PTM) pada umumnya bersifat kronis sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk penyembuhannya. PTM memiliki tingkat kefatalan yang tinggi. Hampir bisa dipastikan penderita TPM

tidak akan sembuh seperti sebelumnya bahkan cenderung memburuk. Penyebab PTM multifaktor yang selanjutnya disebut faktor risiko PTM sejatinya telah dapat diprediksi, sehingga PTM dapat dicegah.

Penyakit yang termasuk PTM utama di Indonesia yaitu penyakit kardiovaskuler, kanker, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), diabetes mellitus serta cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan.

KKP dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular memiliki indikator pelayanan seperti :

1. Layanan Posbindu PTM dengan mendatangi langsung objek yang berisiko tinggi terkena PTM di lingkungan pelabuhan/ bandara seperti pemeriksaan gula darah, kadar kolesterol dan tingkat tekanan darah.
  2. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Gangguan Indera dengan melakukan sosialisasi pencegahan penyakit gangguan indera penglihatan dan pendengaran pada penyelam dan nelayan tradisional.
  3. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Paru Kronik dengan melakukan advokasi tentang penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) di lingkungan pelabuhan/ bandara.
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit

Untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang perlu adanya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Dukungan tersebut sangat diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, efisien, dan mempunyai daya ungkit. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dapat berupa dukungan dana, SDM, sarana dan prasarana serta pelatihan. Disamping itu dukungan dapat dari instansi vertikal maupun horizontal.



Adapun indikator kegiatan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit di KKP Kelas II Tanjungpinang meliputi :

- i. Layanan Internal berupa pengadaan kendaraan bermotor, pembangunan dan renovasi gedung, penyusunan rencana program, pelaksanaan pemantauan dan informasi, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum dan perlengkapan, pelayanan rumah tangga, pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, pengadaan bahan dan alat kesehatan.
- ii. Layanan Perkantoran berupa belanja gaji pegawai, operasional dan pemeliharaan kantor, perawatan kendaraan operasional, biaya langganan listrik, telepon dan air, dan honor operasional.
- iii. Persiapan dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berdasarkan instruksi dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

### **3.2 Strategi**

Strategi yang dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang untuk mencapai visi misi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria)
2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi
3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program
4. Mengembangkan (investasi) SDM
5. Memperkuat jejaring kerja
6. Memperkuat logistik, distribusi, dan manajemen
7. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi
8. Melaksanakan supervisi/bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan

**BAB IV**  
**PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**  
**DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG**

**5.1 Program Pokok**

Program pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang sebagai berikut :

1. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditentukan baik oleh tingkat nasional maupun internasional. NSPK secara internasional antara lain IHR tahun 2005, IMO, ICAO, sedangkan secara nasional mengacu pada NSPK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit antara lain sebagai berikut :

- a. Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- b. Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / Pos Lintas Batas dalam rangka karantina kesehatan.
- c. Pedoman upaya kesehatan pelabuhan dalam rangka karantina kesehatan.
- d. Pedoman standarisasi SDM, sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kantor Kesehatan Pelabuhan

2. Melakukan advokasi dan sosialisasi

a. Advokasi

Kegiatan advokasi merupakan pendekatan kepada para pimpinan/pembuat peraturan perundang-undangan untuk memberikan dukungan, kemudahan, perlindungan pada berbagai upaya cegah tangkal penyakit yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan advokasi baik formal maupun informal. Keluaran dari kegiatan advokasi antara lain :

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan (Surat Edaran/Instruksi/Konvensi Internasional/Surat Keputusan dan perundang-undangan lainnya).
- 2) Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan mata, kesehatan kerja, dan OMKABA.
- 3) Tersedianya anggaran dari pemerintah dan sumber pembiayaan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi meliputi KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi), dukungan/bina suasana dan pemberdayaan masyarakat pelabuhan dalam cegah tangkal penyakit.

1) Penyuluhan (KIE)

- a. Tersedia dan terdistribusinya media KIE
- b. Terlaksananya KIE tentang faktor risiko penyakit dan penyehatan lingkungan serta ancaman lainnya
- c. Terlaksananya KIE tentang OMKABA
- d. Terlaksananya KIE tentang pelayanan kesehatan
- e. Terlaksananya KIE tentang kesehatan mata
- f. Terlaksananya KIE tentang peraturan dan perundang-undangan
- g. Terlaksananya KIE tentang sanitasi kapal
- h. Terlaksananya KIE tentang penyakit tidak menular (PTM)

2) Bina Suasana

Kelompok sasaran dari bina suasana adalah state holder, mitra, dan masyarakat di pelabuhan dan bandara.

3) Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan sosialisasi guna menumbuhkan potensi masyarakat secara optimal dalam pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan serta berperan sebagai fasilitator kegiatan pengendalian dan penyehatan lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi, dan inovasi program Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan kemajuan teknologi dan kondisi daerah setempat (lokal area specific) melalui perencanaan terpadu dan terkoordinasi.
4. Mengembangkan (investasi) sumber daya manusia antara lain dengan melaksanakan/mengikuti pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang program/kegiatan Kantor Kesehatan Kelas II Tanjungpinang.
5. Memfasilitasi terbentuknya jejaring kerja yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesehatan Kelas II Tanjungpinang.
6. Memperkuat logistik peralatan deteksi dini faktor risiko, diagnostik, dan penanggulangan penyakit bersifat massal di masyarakat dan di fasilitas kesehatan baik ketersediaan (sesuai dengan kebutuhan) maupun manajemen.
7. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini dan penanganan kasus (penderita), SKD, KLB, Surveilans Epidemiologi dan pengembangan sistem informasi.
  - a. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini aktif pada kelompok masyarakat pelabuhan.
  - b. Melaksanakan penanganan deteksi/diagnosis dini aktif pada kelompok masyarakat pelabuhan.
  - c. Melaksanakan deteksi/diagnosis dini pasif di fasilitas/sarana kesehatan di lingkungan pelabuhan/bandara.
  - d. Melaksanakan penanganan khusus sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP).

- e. Melaksanakan surveilans epidemiologi faktor risiko dan kasus terintegrasi dengan surveilans epidemiologi nasional termasuk surveilans epidemiologi faktor risiko berbasis masyarakat.
  - f. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang esensial agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian keputusan dalam upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di lingkungan pelabuhan/bandara.
  - g. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi manajemen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dengan menggunakan kemajuan teknologi dan informasi.
8. Monitoring dan Evaluasi
9. Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang melalui APBN dan sumber dana lainnya.

#### **4.2 Jejaring Kerja KKP Kelas II Tanjungpinang dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu Gerbang Negara**

Jejaring kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai sektor dan program, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dalam rangka kerja sama dan koordinasi berdasarkan atas kesepakatan, prinsip dan perananan masing-masing dalam mendukung upaya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang. Upaya tersebut diwujudkan dengan membentuk jejaring baik lokal, regional, nasional maupun internasional.

Jejaring kerja yang dilakukan pada tahun 2015-2019 adalah ketika terjadi pandemik Mers-CoV dan Virus Zika dimana Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam melaksanakan cegah tangkal membentuk jejaring kerja

dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Imigrasi, INSA, Pelindo, RSUD Kota Tanjungpinang beserta dengan instansi yang terkait.

Jejaring kerja yang dilaksanakan rutin adalah penanganan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B) yang dideportasi dari Malaysia dan penyelenggaraan forum pelabuhan sehat Bandar Bentan Telani Lagoi. Dalam penanganan TKI-B deportasi dari Malaysia Dalam kegiatan tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang beserta Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan, Kepolisian Kawasan Pelabuhan, dan Kantor Imigrasi Tanjungpinang tergabung dalam Satuan Petugas Penanganan TKI-B (SATGAS TKI-B) dibawah koordinasi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

## **BAB V PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

Berdasarkan visi, misi, nilai, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta sasaran strategis, maka penyelenggaraan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang di pintu gerbang negara pada periode tahun 2015-2019 dilaksanakan melalui pokok-pokok kegiatan sebagai berikut :

### **5.1 Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan, dan Kesehatan Matra.**

Tujuan dari peningkatan kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang adalah untuk melaksanakan cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular berpotensi wabah serta faktor risiko kesehatan dari dan ke luar negeri melalui alat angkut, orang dan barang dengan melakukan tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan.

Sasaran dari upaya peningkatan kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi sampai tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pengawasan terhadap alat angkut (kapal dan pesawat), orang dan barang yang datang dan berangkat dari dan ke dalam negeri serta luar negeri
- b. Terdeteksinya alat angkut (kapal dan pesawat), orang dan barang dari sumber penularan penyakit
- c. Terbebasnya alat angkut dan barang dari investasi vektor penyakit
- d. Terlaksananya deteksi dini penyakit tidak menular (PTM) pada ABK/keompok sasaran
- e. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan faktor risiko penyakit menular di wilayah Pelabuhan/Bandara
- f. Terlaksananya jejaring kerja/kemitraan lintas program dan lintas sektor

Implementasi dari upaya tersebut berupa kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan kesehatan alat angkut (kapal dan pesawat)
- b. Pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan
- c. Pengawasan dan pemeriksaan jenazah di Pelabuhan/Bandara
- d. Melaksanakan tindakan karantina
- e. Surveilans epidemiologi faktor risiko penyakit pada TKI-B
- f. Surveilans epidemiologi di sarana kesehatan
- g. Sosialisasi IHR 2005
- h. Surveilans epidemiologi faktor risiko penyakit tidak menular pada ABK Kapal
- i. Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan Haji dan Umrah
- j. Melaksanakan jejaring kerja dan kemitraan

Luaran :

- a. Tercegahnya penyakit PHEIC melalui alat angkut, orang dan barang di Pelabuhan dan Bandara
- b. Meningkatnya kualitas surveilans epidemiologi melalui faktor risiko dan penanganan KLB serta analisa data dan diseminasi informasi
- c. Meningkatnya deteksi dini PTM

Indikator dari kegiatan :

- a. Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB
  - 1) Terlaksananya koordinasi surveilans kewaspadaan dini dan KLB lintas program, lintas sektor, dan wilayah kerja
  - 2) Terlaksananya surveilans berbasis kejadian dalam kewaspadaan dini penyakit seperti surveilans TKI-B
- b. Layanan Kekarantinaan Kesehatan
  - 1) Terlaksananya sistem pelaporan dan penerbitan dokumen melalui SIMKESPEL
  - 2) Terlaksananya pelatihan/workshop petugas KKP
  - 3) Terlaksananya pengawasan lalu lintas orang, barang dan alat angkut



- 4) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan
  - 5) Terlaksananya penyelenggaraan pelabuhan/bandara sehat
  - 6) Terlaksananya advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan/bandara, PLBDN dan wilayah.
  - 7) Terlaksananya koordinasi program karantina kesehatan di pelabuhan/bandara, PLBDN dan wilayah.
  - 8) Terlaksananya pelayanan kesehatan.
  - 9) Terlaksananya bimbingan teknis ke wilayah kerja KKP Tanjungpinang.
  - 10) Terlaksananya monitoring dan evaluasi di wilayah kerja KKP Tanjungpinang.
  - 11) Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan kekarantinaan kesehatan.
  - 12) Terlaksananya penyusunan rencana kontijensi penanggulangan KKM.
  - 13) Terlaksananya review dokumen rencana kontijensi.
  - 14) Terlaksananya *table-top exercise* / simulasi penanggulangan KKM
- c. Layanan Pengendalian Penyakit Infeksi *Emerging* (PIE)
- 1) Terlaksananya penyelidikan epidemiologi PIE.
  - 2) Terlaksananya verifikasi rumor PIE.
  - 3) Terlaksananya pengadaan logistik pencegahan dan pengendalian PIE
  - 4) Terlaksananya Koordinasi program PIE.
  - 5) Terlaksananya pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyakit infeksi *emerging*

## **5.2 Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang.**

Tujuan dari upaya peningkatan dari pengendalian risiko lingkungan adalah agar wilayah pelabuhan dan alat angkut tidak menjadi sumber penularan ataupun habitat yang subur bagi perkembangbiakkan kuman/vektor penyakit.

Sasaran dari peningkatan pengendalian risiko lingkungan sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya lingkungan pelabuhan dan bandara yang bebas dari sumber dan vektor penularan penyakit melalui pengamatan dan pengendalian vektor penyakit malaria, DBD, diare dan Pes.
- b. Terwujudnya lingkungan pelabuhan dan bandara yang bersih dan sehat melalui pengawasan dan pemeriksaan air bersih, pengawasan dan pemeriksaan sanitasi lingkungan pelabuhan/bandara, pengawasan dan pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengelolaan makanan (TPM), pengawasan kualitas udara, pemeriksaan air minum dan penguatan jejaring kemitraan lintas program dan lintas sektor .

Impelementasi dari kegiatan peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang adalah :

- a. Melaksanakan pengendalian tikus dan pinjal pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja
- b. Melaksanakan survey dan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk *Aedes aegypti* penular DBD pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja
- c. Melaksanakan survey dan pemberantasan nyamuk dan jentik nyamuk *Anopheles sp.* penular Malaria pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja
- d. Melaksanakan survey dan pemberantasan lalat dan kecoak pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja
- e. Melaksanakan inspeksi sanitasi air bersih pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di wilayah kerja
- f. Melaksanakan inspeksi sanitasi lingkungan TTU/TPM di pelabuhan/bandara
- g. Melaksanakan pengukuran kualitas udara
- h. Melaksanakan pemeriksaan air minum pada alat angkut dan pelabuhan/bandara di seluruh wilayah kerja

- i. Melaksanakan penyuluhan tentang faktor risiko terjadinya penyakit yang bersumber lingkungan
- j. Memperkuat jejaring kerja dan kemitraan

Luaran kegiatan peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang adalah :

- a. Menurunnya angka kepadatan vektor dan binatang penular penyakit
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan pelabuhan dan bandara

Indikator dari kegiatan kegiatan peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang adalah :

- a. Layanan Pengendalian Penyakit Malaria
  - 1) Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan pengendalian malaria
  - 2) Terlaksananya workshop petugas surveilans migrasi dalam rangka cegah tangkal penularan malaria
- b. Layanan Pengendalian Penyakit Arbovirosis : Terbentuknya Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di wilayah kerja Bintan dan Tanjungpinang
- c. Layanan Pengendalian Penyakit Zoonosis : Terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor pencegahan dan pengendalian zoonosis
- d. Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
  - 1) Tersedianya data terkait surveilans vektor (*Aedes*, *Anopheles*, pinjal dan lalat)
  - 2) Terlaksananya pengendalian vektor (*Fogging*, *Internal Residual Spraying*, Larvasidasi, Pemberantasan Sarang Nyamuk)
  - 3) Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit seperti mesin *fogging*, *spray can*, insektisida, perangkap tikus, *entomolog kit* dan lain-lain.
  - 4) Terlaksananya koordinasi, advokasi, dan sosialisasi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di KKP.
  - 5) Meningkatnya kapasitas SDM tenaga entomolog dan pengendalian vektor.

### 5.3 Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung

Tujuan dari upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung peningkatan upaya kesehatan lintas wilayah adalah terlaksananya upaya kesehatan pelabuhan dalam rangka mendukung kegiatan karantina melalui kegiatan pelayanan kesehatan terbatas, kegawatdaruratan, pemeriksaan kesehatan haji, pemeriksaan kesehatan umrah, pemeriksaan kesehatan matra, pengawasan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan nahkoda/ABK, pelayanan vaksinasi, pengawasan orang sakit dan obat-obatan/P3K sesuai dengan standar.

Sasaran peningkatan kinerja upaya kesehatan lintas wilayah sampai tahun 2019 :

- a. Terlaksananya pelayanan kesehatan terbatas yang optimal di wilayah pelabuhan/bandara
- b. Terlaksananya pelayanan kesehatan matra yang optimal di wilayah pelabuhan/bandara
- c. Terlaksananya pelayanan kesehatan kerja yang optimal di wilayah pelabuhan/bandara
- d. Terlaksananya pelayanan pendampingan kesehatan haji di wilayah debarkasi/embarkasi
- e. Terlaksananya sosialisasi dan jejaring kerja/kemitraan dengan lintas proram dan lintas sektor terkait

Implementasi dari sasaran tersebut berupa kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah pelabuhan/bandara
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan matra
- c. Melaksanakan pelayanan pendampingan kesehatan haji
- d. Melaksanakan jejaring/kemitraan lintas proram dan lintas sector
- e. Melakukan penyuluhan dan *mobile VCT* untuk penemuan kasus baru HIV di wilayah pelabuhan

- f. Melakukan penyuluhan dan *mobile* pemeriksaan IMS untuk penemuan kasus baru HIV di wilayah pelabuhan
- g. Melakukan sosialisasi terkait penyakit TB pada masyarakat pelabuhan
- h. Melakukan sosialisasi penyakit infeksi saluran pencernaan pada penjamah makanan
- i. Melakukan advokasi dan sosialisasi kesiapsiagaan (PHEIC ISPA/Pneumonia)

Luaran kegiatan ini adalah :

- 1) terlaksananya pelayanan kesehatan di wilayah pelabuhan/bandara
- 2) Menurunnya angka kesakitan dan kematian penyakit HIV/AIDS, TB, IMS, ISP dan ISPA di wilayah pelabuhan/bandara

Indikator kinerja dari upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung :

- a. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS berupa terlaksananya surveilans epidemiologi dan sistem informasi program pengendalian HIV/AIDS
- b. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit IMS berupa terlaksananya surveilans epidemiologi dan sistem informasi program pengendalian IMS
- c. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB adalah terlaksananya deteksi dini TB
- d. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISP berupa terlaksananya sosialisasi dan advokasi diare, Hepatitis A dan E, dan typhoid.
- e. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA berupa bimbingan teknis penyusunan rencana kontijensi daerah mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA

#### **5.4 Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat PTM, Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan PTM**

Tujuan dari upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat PTM, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan PTM adalah memacu kemandirian masyarakat pelabuhan/bandara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan PTM untuk menurunkan kejadian penyakit tidak menular (PTM) dan meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat khususnya yang berada di wilayah pelabuhan/bandara .

Sasaran program penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular, meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular adalah :

- a. Terlaksananya pelayanan kesehatan terbatas yang optimal di wilayah pelabuhan/bandara
- b. Terlaksananya pelayanan kesehatan kerja yang optimal di wilayah pelabuhan/bandara
- c. Terlaksananya sosialisasi dan jejaring kerja/kemitraan dengan lintas proram dan lintas sektor terkait pencegahan dan penanggulangan PTM
- d. Terlaksananya intervensi secara terpadu dalam penetapan kawasan tanpa rokok

Implementasi dari sasaran tersebut berupa kegiatan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan Posbindu PTM
- b. Melaksanakan sosialisasi gangguan indera di bandara/pelabuhan
- c. Melaksanakan gerakan masyarakat dalam pengendalian tembakau

Luaran kegiatan ini adalah :

- a. Terlaksananya pelayanan Posbindu PTM khusus
- b. Terlaksananya sosialisasi gangguan indera di bandara/pelabuhan
- c. Edukasi bahaya merokok bagi masyarakat awam di lingkungan pelabuhan

Indikator kinerja dari upaya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung :

- a. Adanya pelayanan Posbindu PTM khusus
- b. Masyarakat pelabuhan/bandara mengerti dan memahami cara pencegahan penyakit gangguan indera
- c. Masyarakat pelabuhan/bandara mengerti dan memahami bahaya merokok bagi kesehatan

#### **5.5 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya**

Tujuan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah memberikan dukungan agar pelaksanaan tugas pokok dan tugas fungsi dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dapat berjalan dengan lancar, efisien dan efektif serta memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan program dan kegiatan melalui manajemen yang baik dan akuntabel.

Sasaran dari dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan perencanaan dan informasi
- b. Peningkatan urusan organisasi dan hubungan masyarakat
- c. Peningkatan pengelolaan keuangan
- d. Peningkatan urusan kepegawaian dan umum

Implementasi dari sasaran tersebut berupa kegiatan :

- a. Perencanaan dan informasi
  - 1) Penyusunan perencanaan melalui mekanisme *bottom up planning*
  - 2) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL)
  - 3) Penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)
  - 4) Penyusunan perjanjian kinerja
  - 5) Penyusunan laporan kinerja
  - 6) Penyusunan profil
  - 7) Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan

- 8) Penyusunan rencana aksi kegiatan (RAK)
- 9) Penyusunan formasi kepegawaian

Luaran :

Tersusunnya perencanaan yang informatif, efektif dan efisien serta akuntabel.

Indikator pencapaian :

- 1) Jumlah dokumen dari wilayah kerja sebanyak 9 dokumen per tahun
  - 2) Jumlah dokumen RKA-KL sebanyak 1 dokumen per tahun
  - 3) Jumlah dokumen DIPA sebanyak 1 dokumen per tahun
  - 4) Jumlah dokumen perjanjian kerja sebanyak 1 dokumen per tahun
  - 5) Jumlah dokumen laporan kinerja sebanyak 1 dokumen per tahun
  - 6) Jumlah dokumen profil sebanyak 1 dokumen per tahun
  - 7) Jumlah laporan bulanan sebanyak 12 laporan per tahun, laporan triwulan sebanyak 4 laporan per tahun, serta laporan tahunan sebanyak 1 laporan per tahun
  - 8) Jumlah dokumen RAK sebanyak 1 dokumen per tahun
  - 9) Jumlah dokumen usulan formasi kepegawaian sebanyak 1 dokumen per tahun
- b. Peningkatan urusan organisasi dan hubungan masyarakat
- 1) Laporan SIMAK BMN
  - 2) Pemeliharaan roda empat dan roda dua
  - 3) Oprasional perkantoran
  - 4) Perbaikan peralatan kantor
  - 5) Perbaikan peralatan fungsional
  - 6) Pengadaan barang dan jasa
  - 7) Perbaikan gedung kantor dan halaman
  - 8) Sewa gedung/tanah
  - 9) Pengadaan pakaian dinas
  - 10) Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran



Luaran :

Terelenggaranya urusan organisasi secara efektif, efisien dan akuntabel.

Indikator pencapaian :

- 1) Laporan SIMAK BMN tepat waktu dan akurat
- 2) Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua sebesar 100%
- 3) Realisasi operasional perkantoran sebesar >90%
- 4) Realisasi perbaikan peralatan perkantoran sebesar >90%
- 5) Realisasi perbaikan peralatan fungsional sebesar 90%
- 6) Realisasi pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lancar dan akuntabel
- 7) Realisasi perawatan gedung kantor dan halaman sebesar >90%
- 8) Realisasi sewa gedung/tanah sebesar 100%
- 9) Realisasi pakaian dinas sebesar >90%
- 10) Realisasi kebutuhan sehari-hari perkantoran sebesar >90%

c. Peningkatan pengelolaan keuangan

- 1) Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tepat waktu, akurat dan akuntabel
- 2) Laporan bulanan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
- 3) Laporan gaji dan honorarium

Luaran :

Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang tertib, lancar dan akuntabel

Indikator pencapaian :

- 1) Jumlah laporan SAI sebanyak 12 laporan per tahun
- 2) Jumlah laporan bulanan PNBP sebanyak 12 laporan per tahun
- 3) Persentase pembayaran gaji dan honorarium sebesar 100%

d. Urusan kepegawaian dan umum

- 1) Laporan SIMKA
- 2) Pelaksanaan diklat bagi pegawai
- 3) Pelaksanaan pembayaran langganan daya dan jasa

4) Pelaksanaan administrasi surat menyurat perkantoran

Luaran :

Terselenggaranya administrasi urusan kepegawaian dan umum secara tertib dan lancar.

Indikator pencapaian :

- 1) Persentase kenaikan pangkat sebesar 100%
- 2) Persentase penilaian kinerja sebesar 100%
- 3) Jumlah dokumen Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sebanyak 1 dokumen
- 4) Persentase yang mengikuti diklat sebesar >90%
- 5) Persentase pembayaran langganan daya dan jasa sebesar 100%
- 6) Persentase administrasi surat menyurat sebesar 100%

Penyelenggaraan rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjungpinang dilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian serta pertanggungjawaban.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN PENILAIAN

### A. Pemantauan

Pemantauan yang di lakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam rangka untuk pencapaian Aksi Kegiatan yang di lakukan adalah dengan pengendalian internal mulai dari Pimpinan hingga pegawai sehingga mengetahui sejauh mana progress kegiatan tersebut.

Pengendalian Internal yang dilakukan

1. Rencana Aksi yang jelas, tepat dan terjadwal sesuai POA
2. Kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan kegiatannya sesuai dengan DIPA/RKAKL.
3. Ketaatan terhadap peraturan dan perundangan
4. Komitmen untuk menjadi WBK/WBBM

Pemantauan progres pencapaian target indikator kinerja kegiatan secara rutin dilaksanakan setiap awal bulan setelah bulan pelaksanaan kegiatan berakhir dan didukung pula dengan evaluasi tiap semester.

Pemantauan juga dilakukan secara eksternal oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dengan menggunakan Aplikasi e-Monev DJA, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui aplikasi e-Monev Bappenas.

### B. Penilaian

Berikut adalah indikator KKP Kelas II Tanjung Pinang beserta cara penghitungannya :

No	Indikator	Cara Perhitungan
1	Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekeparantinaan Kesehatan	membandingkan antara target dan realisasi, jika realisasi diatas target tercapai sebaliknya di bawah target tidak tercapai
2	Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit Menular	membandingkan antara target dan realisasi, jika realisasi diatas target tercapai sebaliknya di bawah target tidak tercapai

3	Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus	membandingkan antara target dan realisasi, jika realisasi diatas target tercapai sebaliknya di bawah target tidak tercapai
4	Jumlah Pelabuhan/Bandara yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi	membandingkan antara target dan realisasi, jika realisasi diatas target tercapai sebaliknya di bawah target tidak tercapai
5	Jumlah Sertifikat Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang diterbitkan	membandingkan antara target dan realisasi, jika realisasi diatas target tercapai sebaliknya di bawah target tidak tercapai
6	Jumlah Pelabuhan/Bandara Wilayah Perimeter dan Buffer Area Bebas Vektor	membandingkan antara target dan realisasi, jika realisasi diatas target tercapai sebaliknya di bawah target tidak tercapai
7	Jumlah orang yang Melakukan Skrining Penyakit Tidak Menular	membandingkan antara target dan realisasi, jika realisasi diatas target tercapai sebaliknya di bawah target tidak tercapai
8	Jumlah orang yang melakukan Skrining dan/atau Sosialisasi Penyakit Menular Langsung	membandingkan antara target dan realisasi, jika realisasi diatas target tercapai sebaliknya di bawah target tidak tercapai
9	Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dilaporkan ke Ditjen P2P	membandingkan antara target dan realisasi, jika realisasi diatas target tercapai sebaliknya di bawah target tidak tercapai
10	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana	membandingkan antara target dan realisasi, jika realisasi diatas target tercapai sebaliknya di bawah target tidak tercapai

### C. Pelaporan

Pelaksanaan program yang baik akan jauh lebih bermakna bila didukung dengan pelaporan kegiatan yang handal. Didalam pelaporan tersebut ada pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program. Pelaporan tersebut yaitu :

- Laporan Evaluasi Kinerja
- Laporan Keuangan
- Laporan Tahunan
- Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana aksi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Kantor Kesehatan Kelas II Pelabuhan Tanjungpinang periode waktu 2015-2019 disusun untuk menjawab dan memfokuskan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dalam menghadapi tantangan strategis di masa depan dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan penilaian dalam kurun waktu 5 tahun. Rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Kelas II Pelabuhan Tanjungpinang dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang lebih terukur, efisien dan efektif sesuai dengan RPJM Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Diharapkan melalui penyusunan rencana aksi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Kantor Kesehatan Kelas II Pelabuhan Tanjungpinang ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam cegah tangkal penyakit PHEIC berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

**REVISI**  
**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG TAHUN 2015-2019**

NO	Kegiatan	Output	Indikator	TARGET					Unit Pelaksana
				2015	2016	2017	2018	2019	
	Penyelenggaraan PP & PL di Pintu Masuk negara		Terkendalanya seluruh kondisi potensial untuk melakukan cegah tangkal penyakit di Pelabuhan, Bandar Udara dan PLBD						
1	Melaksanakan pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar keamanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Keamanan Kesehatan	1.208	1.224	1.240	1.315	1.396	
	SSCEC	Dokumen		700	715	730	750	800	Seksi PKSE
	SSCC	Dokumen		8	9	10	15	20	Seksi PKSE
	Sertifikat P3K Kapal	Dokumen		500	500	500	550	576	Seksi UKLW
2	Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Diri terhadap masuk dan keluarnya penyakit menular		Jumlah Deteksi Diri dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit Menular	18.828	21.528	24.228	29.428	30.828	
	Jumlah Pemeriksaan alat angkut dari luar negeri	Dokumen		3.800	4.000	4.200	4.400	4.800	Seksi PKSE
	Jumlah pemeriksaan alat angkut dalam negeri	Dokumen		15.000	17.500	20.000	25.000	26.000	Seksi PKSE
	Jumlah laporan surveilans wilayah bandar/Pelabuhan	Dokumen		12	12	12	12	12	Seksi PKSE
	Jumlah surveilans kedatangan penumpang	Dokumen		12	12	12	12	12	Seksi PKSE
	Jumlah laporan Surveilans situasi khusus (pra embarkasi, embarkasi, debarokasi, pasca debarokasi, lebaran, natal dan tahun baru)	Dokumen		4	4	4	4	4	Seksi PKSE
3	Pelayanan Kesehatan yang di laksanakan pada saat situasi Khusus tertentu (lebaran, natal, dan tahun baru)		Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus	570	1.224	540	440	580	
	Lebaran	Pelayanan		70	75	30	30	50	Seksi UKLW
	Natal	Pelayanan		-		10	10	30	Seksi UKLW

Lampiran 1.

	TKI B	Pelayanan		500	1.149	500	400	500		Seksi UKLW
4	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan	Pelabuhan/Bandara	Jumlah Pelabuhan/Bandara yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi	8	8	9	9	9		Seksi PRL
	Sanitasi tempat-tempat umum dengan kriteria baik	Pelabuhan/Bandara		8	8	9	9	9		Seksi PRL
	TPM memenuhi syarat Layak/Laik Hygiene	Pelabuhan/Bandara		8	8	9	9	9		Seksi PRL
	Tempat pengolahan air memenuhi syarat fisik baik	Pelabuhan/Bandara		8	8	9	9	9		Seksi PRL
5	Jumlah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan permintaan/pemohonan yang diterima	Dokumen	Jumlah Sertifikat/Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang diterbitkan	1.305	1.847	1.170	1.283	1.190		
	Jumlah Sertifikat Izin Angkut Laik Terbang	Dokumen		75	95	40	50	45		Seksi UKLW
	Jumlah Sertifikat Izin Angkut Orang Sakit	Dokumen		80	169	100	100	110		Seksi UKLW
	Jumlah Sertifikat Izin Angkut Jenazah	Dokumen		50	66	30	33	35		Seksi UKLW
	Jumlah Pemberian ICV	Dokumen		1.100	1.517	1.000	1.100	1.000		Seksi UKLW
6	Memangnyanya Wilayah bebas Vektor Pelabuhan/Bandara		Jumlah Pelabuhan/Bandara Wilayah Perimeter dan Buffer Area Bebas Vektor	8	8	9	9	9		
	Wilayah bebas Vektor Pelabuhan/Bandara	Pelabuhan/Bandara		8	8	9	9	9		Seksi PRL
7	Jumlah orang yang melaksanakan skrining penyakit tidak menular meliputi Tekanan darah, BB, TB, Gula darah dan kolesterol minimal 2 kali dalam setahun	Orang	Jumlah orang yang Melakukan Skrining Penyakit Tidak Menular	650	900	1400	1.200	1.200		Seksi UKLW
8	Jumlah orang yang melaksanakan skrining dan/atau Sosialisasi penyakit menular meliputi :		Jumlah orang yang melakukan Skrining dan/atau Sosialisasi Penyakit Menular Langsung	225	345	150	100	200		
	TB	Orang		100	100	50	50	100		Seksi UKLW
	HIV	Orang		125	245	50	50	100		Seksi UKLW
	Lain Lain, Sebutkan	Orang				50				Seksi UKLW

Lampiran 1.

9	Dokumen Dukungan Manajemen pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 12 Dokumen yakni sebagai berikut :	RKAKL/DIPA	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dilaporkan ke Ditjen P2P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha		
		Laporan Tahunan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		Laporan Keuangan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		Laporan BMN	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		Laporan Kinerja	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		Profil	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		Proposal PNBP	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		Dokumen Kepegawaian	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		E-Money Bappenas (PP 39)	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		Laporan Eksekutif Bulanan (LEB)	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		Laporan SIMKESPEL	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		E-Money DJA	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tata Usaha	
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana meliputi :				Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana	3	6	6	6	3	0				
			Tanah		Paket												
	Gedung	Paket			1	2	2	1	2					Tata Usaha			
	Alat Kesehatan	Paket			2	2	3	3						Tata Usaha			
	Fasilitas Penunjang Perkantoran	Paket				2	2	2	1					Tata Usaha			

Tanjungpinang, Januari 2017  
 Kepala KKP Kelas II Tanjungpinang



Sulistiyono, SKM, M.Kes  
 NIP. 197011201993031002